Buletin
Parlementaria
Nomor 1222/IV/X/2022 • Oktober 2022

Izin Pemanfaatan Taman Nasional Bunaken Harus Segera Diselesaikan

3 Parlemen Harus Tangkap Peluang, Dorong Kesetaraan

4 Terima Masukan PB IDI Terkait RUU Kesehatan

9 772614 339005

FOTO : PRIMA/PDT

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke TN Bunaken, Sulawesi Utara, Senin (10/10).

Izin Pemanfaatan Taman Nasional Bunaken Harus Segera Diselesaikan

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan segala macam perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan Taman Nasional (TN) Bunaken di Sulawesi Utara. Pasalnya ketidakjelasan perizinan ini dapat mengancam industri pariwisata itu sendiri serta kelestarian dari terumbu karang yang ada di Taman Nasional tersebut.

Oleh karena itu Sudin meminta seluruh pemangku kepentingan terkait segera menyusun aturan jelas serta mencari solusi demi keberlangsungan pariwisata di TN Bunaken. "Nanti sambil berjalan sambil diurus segala macam perizinan dan lain sebagainya. Sebab Bunaken ini kan milik kita bersama," ujar Sudin saat memimpin kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke TN Bunaken, Sulawesi Utara, Senin (10/10).

Termasuk menjaga Bunaken dari pencemaran sampah. Sudin mencontohkan seperti pencemaran dari sampah cair rumah tangga di TN tersebut yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). "Maka saya minta satu paket pada anggaran 2023 disediakan di Bunaken ini," sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sudin pun menambahkan sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penyelesaian masalah aturan tersebut, DPR sebagai mitra dari pemerintah akan segera mengagendakan rapat kerja. Dimana pihaknya akan membahas masalah terkait, agar segera ditemukan jalan keluar yang menjadi kesepakatan bersama.

"Terkait masalah perizinan dan lain sebagainya di Bunaken ini bersama dicarikan solusi terbaik, kita akan agendakan rapat kerja kita harus cari *win-win solution* agar rakyat tidak dirugikan, negara tidak dirugikan dan undang undang peraturan tidak boleh dilanggar," ucap Sudin.

Tak hanya soal penerapan aturan, Legislator Dapil Lampung I ini berharap adanya kesadaran dari para pelaku usaha yang ada di wilayah TN Bunaken. Supaya dapat memberikan edukasi kepada para wisatawan yang datang dalam upaya menjaga kelestarian TN Bunaken. "Harus ada sosialisasi dan edukasi kepada pelaku pelaku usaha di bunaken untuk para wisatawan untuk tidak boleh menginjak terumbu karang dan membantu melestarikan terumbu karang agar laut disekitar semakin indah dan lestari kedepannya," pungkas Sudin. ● **pdt/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Parlemen Harus Tangkap Peluang, Dorong Kesetaraan

FOTO: IST/PDT

Ketua DPR RI (H.C) Puan Maharani menghadiri 'Report of the 14th Summit of Women Speakers of Parliament'.

Ketua DPR RI (H.C) Puan Maharani menghadiri *'Report of the 14th Summit of Women Speakers of Parliament'*. Ia mengingatkan soal pembahasan dalam KTT Ketua Parlemen Perempuan dunia yang digelar di Tashkent, Uzbekistan, dengan fokus terhadap penilaian manfaat dan risiko teknologi baru untuk antisipasi risiko dan ketahanan ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, parlemen harus menangkap peluang itu untuk mendorong kesetaraan gender yang lebih besar, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun dunia yang lebih inklusif.

"Kami prihatin dengan risiko yang ditimbulkan oleh kesenjangan digital yang semakin besar, pelecehan *online*, berita palsu, ujaran kebencian, dan kekerasan online yang menghambat hak dan kebebasan perempuan dan anak perempuan di mana pun," kata Puan dalam keterangan pers yang diterima **Parlementaria** pada Rabu (12/10).

Oleh karenanya, Ketua DPR RI itu menyerukan agar risiko ini diatasi melalui kebijakan yang menjembatani kesenjangan digital dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan secara online. KTT Ketua Parlemen Perempuan dunia pun mengakui peran parlemen yang peka gender dalam mendorong legislasi yang responsif gender.

Deklarasi Tashkent, yang diadopsi pada akhir KTT, mencerminkan komitmen dari Ketua Parlemen perempuan dunia untuk mengubah institusi masing-masing menjadi parlemen yang peka gender serta memberlakukan undang-undang yang responsif gender. legislasi tersebut akan merespons soal peningkatan risiko yang melindungi hak dan kebebasan kelompok rentan perempuan dan anak perempuan di mana pun. ● **gal/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Prima Danutirto, A.Md, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonco Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Terima Masukan PB IDI Terkait RUU Kesehatan

FOTO: OJI/PDT

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar saat menerima audiensi Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menerima audiensi Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10). Dipimpin langsung oleh Ketua PB IDI Adib Khumaidi, organisasi profesi tersebut memberikan beberapa masukan terkait penyusunan RUU tentang Kesehatan yang akan disahkan sebagai salah satu RUU Prolegnas Prioritas tahun 2023.

"Mereka menyampaikan mengenai RUU tentang Kesehatan yang dibahas menggunakan metode Omnibus Law. Menurut mereka tidak ada urgensi merevisi UU tentang kesehatan dengan metode omnibus. Masukan IDI penting agar tidak gegabah memutuskan UU dibahas secara omnibus," kata Legislator Dapil Jawa Timur VIII itu.

Politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin tersebut berkomitmen akan meneruskan masukan dan aspirasi dari PB IDI ke AKD terkait untuk dijadikan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan. Dalam kesempatan itu, Gus Imin menyampaikan apresiasi atas kerja keras IDI yang dinilai telah berhasil menjadi partner produktif dalam menangani krisis kesehatan selama ini.

> **KAMI BERHARAP IDI BISA TERUS BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL YANG BISA MEMBANTU SISTEM KESEHATAN SEMAKIN BAIK**

"Kami mengapresiasi langkah IDI dalam menangani pandemi. IDI menyampaikan siap menjadi ujung tombak dalam kemajuan pelayanan masyarakat. Untuk itu, kami berharap IDI bisa terus bekerjasama dengan pemerintah sebagai kekuatan sosial yang bisa membantu sistem kesehatan semakin baik," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua PB IDI Adib Khumaidi mengatakan RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) yang masuk dalam usul prolegnas prioritas tidak memiliki urgensi. "Kami mendukung perubahan sistem kesehatan nasional semakin baik. Namun, dengan pembahasan Omnibus Law kami khawatir akan mengubah fungsi yang sudah ada dan baik dalam UU eksisting," katanya. ● **rnm,uc/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

FOTO: AZK/PDT

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat foto bersama usai menerima audiensi Pengurus Besar (PB) Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI).

Rachmat Gobel **Terima Audiensi PB PORDI**

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menerima audiensi Pengurus Besar (PB) Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) di gedung Nusantara III, Senayan. Jumat (14/10). Gobel mengapresiasi keberadaan PB PORDI ini, di mana menurutnya olahraga Domino merupakan sebuah olahraga yang bisa mempersatukan antar pemain. Sebab, permainan Domino tidak memandang perbedaan dalam satu meja.

Selain itu, olahraga Domino juga mampu mengasah keterampilan otak. "Saya sangat mengapresiasi olahraga ini, PORDI juga bisa menjadi wadah bagi masyarakat yang bisa bermain Domino untuk menyalurkan hobinya. karena ini olahraga yang bermain dengan kemampuan otak dan hati kita," ungkap Gobel.

Hadir dalam pertemuan tersebut para pengurus PB PORDI diantaranya Ketua Umum H. Andi Jamaro Dulung, Wakil Ketua Umum H. Andi Rukman Nurdin, Ketua PB PORDI H. Al Amin Nasution, Ketua Liga Nasional A. Yuslin Pattawari. Hadir pula Wasekjen Ophan Lamara, Sekretaris Liga Aswin Akib, Asdar Pananrang, Sufiany Nasrullah, Andi Fery dan Wisnu.

Dalam pertemuan itu, Andi Jamaro Dulung menyampaikan rencana kegiatan yang akan digelar oleh PB PORDI yakni Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Liga Domino Nasional Pertama yang akan dilaksanakan pada 29-31 Oktober 2022 mendatang di Grand Cempaka, Jakarta. Dirinya juga merinci, selain Kejurnas akan dilaksanakan Pelantikan dan Rakernas PB PORDI.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Umum Andi Rukman Nurdin, juga menyampaikan ingin menghilangkan kesan Domino yang sebagian orang menganggap judi, padahal bisa dijadikan sarana bersilaturahmi sekaligus olahraga. Ia turut menyampaikan dalam Kejurnas tersebut sebelumnya telah dilaksanakan seleksi mulai di tingkat Kecamatan hingga Provinsi.

Rachmat Gobel juga didaulat oleh pengurus menjadi Ketua Dewan Penyantun. Dalam pertemuan itu Gobel juga mengajak para peserta untuk menjunjung tinggi sportifitas dalam liga yang akan digelar nanti. ● **azk/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Kodam XIII Sulawesi Utara **Diharapkan Terus Tingkatkan Sinergi**

Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 melakukan kunjungan kerja reses yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI RI Abdul Kharis Almasyhari ke Komando Daerah Militer XIII/Merdeka (Kodam XIII/MDK), Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Tim ingin mengetahui peran Kodam dalam menciptakan kondisi wilayah yang tangguh terhadap potensi ancaman di provinsi tersebut.

Sebab diketahui, Kodam XIII/Merdeka memiliki tanggung jawab luas wilayah yakni sekitar 95.741 KM2 dengan wilayah tanggung jawab yang meliputi 3 Provinsi yakni Prov. Sulawesi Utara, Prov. Gorontalo dan Prov. Sulawesi Tengah. Dimana juga memiliki batas wilayah di sebelah utara yang berbatasan dengan Filipina.

"Oleh karena itu, jika dilihat berdasarkan tugas pokok TNI dan berdasarkan letak geografi yang dimiliki Prov. Sulawesi Utara, wilayah Kodam XIII/MDK dinilai krusial dan berpotensi memunculkan banyak kerawanan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri," ungkap Kharis usai memimpin Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI dengan Panglima Komando Daerah Militer XIII/Merdeka di Markas Kodam XIII/Merdeka, Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Senin, (10/10).

Disamping itu, Kharis pun memberikan apresiasi kepada Kodam XIII/MDK atas kinerja dan profesionalitasnya ditengah keterbatasan dan cakupan wilayah yang sangat luas, Kodam XIII/MDK dinilai mampu bekerja dengan maksimal. "Kami mengapresiasi penjelasan Pangdam XIII/Merdeka mengenai peran dan kiprah Kodam XIII/Merdeka dalam menangkal berbagai kerawanan dan ancaman di wilayah tugas sesuai dengan tugas pokok TNI," ucap Kharis.

Namun demikian, Kharis menambahkan bahwa Komisi I DPR RI juga meminta Kodam XIII/Merdeka untuk dapat terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait guna terpeliharanya kondisi wilayah yang aman dan kondusif.

"Dalam hal ini, seluruh masukan-masukan, gambaran tentang wilayah Kodam XIII/MDK yang telah kami terima pada saat pertemuan, akan kita tindak lanjuti pada saat rapat di pusat nanti dengan pemerintah. Karena Komisi I DPR RI ingin sekali memperjuangkan perbaikan dari seluruh hal yang berkaitan dengan teman-teman di seluruh Kodam khususnya Kodam XIII/MDK ini," tegas Kharis. ● **hnm/aha**

FOTO: HNM/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya

Wakil Ketua Komisi I DPR RI RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI dengan Panglima Komando Daerah Militer XIII/Merdeka di Markas Kodam XIII/Merdeka, Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Senin, (10/10).

Belum Ada **Pembahasan Wacana Pilkada Lewat DPRD**

FOTO: EOT/PDT

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan terkait wacana pilkada dikembalikan melalui DPRD. Pihaknya tengah fokus mengawasi dan konsultasi berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pada tahapan Pemilu yang akan berlangsung.

"Wacana terkait Pilkada, belum ada pembahasan. Sejauh ini masih 27 November 2024. Dengan undang-undang yang tidak direvisi, yakni UU Pilkada nomor 10 tahun 2016," ungkap Saan kepada wartawan, Rabu (11/10).

Ditambahkannya, jika ada kelemahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah mendatang, lebih baik dilakukan perbaikan, bukan malah mengembalikan pilkada lewat DPRD. Sebaliknya jika kembali kepada mekanisme tersebut, menurut Politisi Fraksi Nasdem ini hal itu merupakan sebuah kemunduran. "Menurut saya apabila pilkada langsung ini dinilai ada kelemahan-kelemahan, itu yang kita perbaiki bersama. Bukan berarti kita kembali kita mundur ke masa lalu," tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang. Politisi dari daerah pemilihan Sumatera Utara III ini juga mengungkapkan bahwa sejauh ini Komisi II DPR RI belum membicarakan terkait wacana pilkada lewat DPRD. Dia menegaskan pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan perintah undang-undang.

> **APABILA PILKADA LANGSUNG INI DINILAI ADA KELEMAHAN-KELEMAHAN, ITU YANG KITA PERBAIKI BERSAMA. BUKAN BERARTI KITA KEMBALI KITA MUNDUR KE MASA LALU**

"Perintah Undang-Undang tetap dipilih langsung oleh rakyat. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan itu di Komisi II," jelas Junimart. Selain itu Junimart juga menjelaskan bahwa wacana pilkada lewat DPRD tidak dapat dijadikan jaminan untuk menghindari transaksional. Dan hal itu kembali kepada politik demokrasi yang bersih, sehingga perlu dilakukan kajian akademik yang lebih mendetail.

Sebagaimana diketahui, belakangan muncul wacana Pilkada melalui DPRD, setelah pertemuan Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) beberapa waktu lalu. Disebutkan bahwa kedua lembaga ini sepakat untuk menilik kemungkinan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh masyarakat, tapi melalui DPRD. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD menurut Bamsoet tetap memenuhi asas demokrasi. ● **ayu/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Solusi Kelebihan Kapasitas di Lapas dengan *Restorative Justice*

Persoalan over capacity (kelebihan kapasitas) yang terjadi di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia telah menjadi persoalan yang berkepanjangan, seperti yang mengemuka dalam pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Dari data paparan Kakanwil Sulsel Liberti Sitinjak, total Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) per 5 oktober 2022, sebanyak 10.649 orang, padahal total kapasitas penghuni hanya 6.145 orang. Dari data tersebut, Lapas dan Rutan di Makassar mengalami over kapasitas sebanyak 73,29 persen. Dengan penghuni terbanyak yakni dalam kasus Narkotika.

Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi III Heru Widodo mendorong agar institusi penegakan hukum dapat memberikan jalan keluar untuk menegakkan *restorative justice* kepada pengguna narkoba dengan rujukan rehabilitasi.

"Ditekankan kembali bahwa yang bisa mendapatkan RJ, dalam konteks pengguna narkotika hanya khusus pemakai saja yang rujukanya adalah rehabilitasi, melalui proses assessment, bisa dilihat dari kehidupan sosialnya, keluarga, maupun latar belakang," demikian dikatakan Heru usai melakukan pertemuan di Ruangan Pertemuan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Selasa, (11/10).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan proses pemberian RJ kepada pengguna narkoba, tidak diberikan dengan mudah, melainkan harus melalui beberapa tahap assessment, melihat latar belakang dan kehidupan sosialnya, keluarga maupun lingkungan pertemanan yang dilakukan oleh pihak penegakan hukum.

Menurutnya, RJ bisa menjadi salah satu solusi menekan angka kelebihan kapasitas tersebut. "Dengan demikian institusi penegakan hukum, harus teliti apakah orang tersebut masuk dalam kategori sebagai pengguna, ataukah sebagai pengedar atau bandar. Tentunya dalam assesment-nya bisa dibedakan jika pengedar atau bandar tindakanya adalah pidana dan tidak bisa sebagai (RJ)," tambahnya.

Seperti diketahui, RJ, bisa digunakan untuk kasus-kasus dengan sifat yang ringan, hukuman dibawah lima tahun serta jumlah kerugian tidak besar. Konsep restorative justice ini adalah penyelesaian sebuah perkara tanpa melalui sebuah proses persidangan, lebih mengedepankan pada dialog, musyawarah dan pengambilan solusi melalui perdamaian.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan R. Febrytrianto menjelaskan adanya RJ, dimana peraturannya tertuang pada Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020. "Untuk menghentikan perkara itu dengan RJ, dari kejaksaan negeri harus mendapat persetujuan dari kejaksaan tinggi. Kemudian kejaksaan dengan Kejari ekspos pidana umum untuk mendapatkan kepastian itu disetujui atau tidak, jadi prosedurnya begitu panjang dilakukan," ucapnya. ● **rni/aha**

FOTO: RSB/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa.

Scan QR untuk berita selengkapnya

Polri Diapresiasi **Ungkap Kasus Narkoba Mantan Kapolda Sumbar**

FOTO: JKA/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana.

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menyatakan pengungkapan kasus mantan Kapolda Sumbar yang ditangkap oleh Divisi Propam Mabes Polri karena kasus narkoba membuktikan komitmen Kapolri dalam melakukan 'bersih-bersih' kepolisian. Eva menyampaikan apresiasi dan dukungan semangat terhadap Kapolri untuk mengantarkan Polri yang lebih baik dan 'PRESISI'.

"Kita apresiasi dan mendukung semangat Bapak Kapolri untuk mengantarkan Polri yang lebih baik dan Polri yang benar benar 'PRESISI'. Hal ini membuktikan bahwa Kapolri tidak hanya mampu mendisiplinkan anggotanya dengan pelanggaran etik namun mau bersikap tegas terhadap bawahannya yang melawan hukum," ujar Eva dalam rilis yang diterima **Parlementaria,** Sabtu (15/10).

Bahkan, sanjung Eva, Kapolri tidak hanya mampu menindak anggotanya yang tidak hanya di level bawah namun lebih dari itu sekelas bintang jenderal dua pun tidak luput untuk ditindak jika berulah. "Tindakan tersebut merupakan bukti konkret bahwa Kapolri betul-betul serius membawa kepolisian ke arah yang lebih baik," tandas Legislator Fraksi Nasdem ini.

> **SALAH SATU POIN YANG DISAMPAIKAN PRESIDEN ADALAH MENDORONG KEPOLISIAN UNTUK MEMBERANTAS JUDI ONLINE DAN NARKOBA DI INDONESIA.**

Sebagaimana diketahui, tersiar kabar mantan Kapolda Sumbar yang sedianya dimutasi menjadi Kapolda Jatim ditangkap oleh Divisi Propam Mabes Polri karena kasus narkoba. Kabar itu bertepatan dengan agenda pengarahan oleh Presiden Joko Widodo kepada Kapolri, Kapolda dan Kapolres se-Indonesia pada hari Jumat (14/10). Salah satu poin yang disampaikan Presiden adalah mendorong kepolisian untuk memberantas judi online dan narkoba di Indonesia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun kemudian mendapuk Irjen Tony Harmanto sebagai Kapolda Jatim setelah sebelumnya Irjen Teddy Minahasa yang ditunjuk malah tersandung kasus narkoba. Hal itu tertera dalam Surat Telegram Nomor: ST/2223/X/KEP./2022 tertanggal 14 Oktober 2022. Adapun, posisi Kapolda Sumbar saat ini diisi oleh Irjen Pol Suharyono. Pengangkatan Suharyono tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor: ST/2223/X/KEP./2022 yang diterbitkan pada Jumat kemarin, 14 Oktober 2022. ● **pun/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

KLHK Diminta Tindaklanjuti **Aduan Masyarakat tentang Pengelolaan Limbah di Sulsel**

Wakil Ketua Komisi IV DPR Rusdi Masse Mappasessu meminta Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan pengujian pada air sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah PT Biota Laut Ganggang. Hal itu ia sampaikan dalam kesimpulan rapat usai melakukan tinjauan lapangan dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi IV DPR ke PT Biota Laut Ganggang di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam pertemuan kunker reses tersebut, Komisi IV menghadirkan dua perwakilan masyarakat yang merasakan dampak langsung dari buangan limbah PT Biota Laut Ganggang. Keduanya menyampaikan bahwa efek dari buangan limbah tersebut membuat udang-udang pada tambak mereka mati.

"Dari pihak KLHK tetap melakukan pengawasan, sampai nanti keluar hasil uji lab, baru ditentukan rekomendasi. Tapi dari pihak BLG jika tidak mengindahkan hasil pertemuan ini, maka saya selaku pimpinan akan membawa ini ke Panja Limbah," sebut Rusdi dalam kunjungan kerja itu, Jumat, (7/10).

Pernyataan Rusdi mendapat dukungan dari anggota Komisi IV yang turut hadir dalam kunjungan tersebut. Anggota Fraksi Golkar Muhammad Salim Fakhry, meminta agar limbah buangan dari PT Biota Laut Ganggang tidak merugikan masyarakat.

FOTO: EKI/PDT

Wakil Ketua Komisi IV DPR Rusdi Masse Mappasessu saat melakukan tinjauan lapangan dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi IV DPR ke PT Biota Laut Ganggang di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

"Apapun hasilnya nanti, masyarakat tidak boleh dirugikan perusahaan juga tidak boleh dirugikan. Kita sebagai anggota dewan harus menemukan titik temunya," ujar Legislator Dapil Aceh itu. Sementara Anggota Komisi IV lainnya, Alien Mus mendorong aksi nyata yang segera agar permasalahan limbah yang merugikan masyarakat itu cepat selesai.

"Kalau memang mencari solusi, semua masalah ada solusinya. Tapi bagaimana aksinya? Sekarang kah, nantikah atau tidak sama sekali? " tegas Alien Mus. Melihat apa yang terjadi di PT Biota Laut Ganggang, Anggota Komisi IV Andi Akmal Pasluddin juga mengingatkan para industriawan maupun para investor bahwa masalah limbah merupakan masalah yang urgen, karenanya perlu diperhatikan dengan baik.

"Karena ini menyangkut relasi dengan masyarakat dan juga keberlangsungan industri kita kedepannya," kata Andi. Hadir dalam pertemuan tersebut, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Dirjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Bupati Pinrang dan perwakilan masyarakat. ● **eki/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

TA Khalid: **Masyarakat Sejahtera, Hutan Terjaga**

Menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama, eksploitasi hutan yang tak terkendali akan berakibat bencana bagi semua pihak. Dalam menjaga kelestarian hutan sudah selazimnya melibatkan masyarakat sekitar, menurut Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid, memberikan pemahaman dan mensejahterakan masyarakat di lingkungan hutan harus menjadi perhatian pemerintah. Baginya masyarakat yang sejahtera modal pertama menjaga hutan.

Pernyataan tersebut diungkapkan saat Kunjungan Kerja Komisi IV di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Banda Aceh. Anggota Dewan dari Dapil Aceh ini mengatakan hutan di Aceh akan terjaga apabila masyarakat yang menjaga dan tinggal di sekitar hutan di dukung dengan anggaran.

Lebih lanjut dia menjabarkan, bahwa kelestarian hutan akan membawa kesejahteraan bagi hidup banyak orang. "Bahwa masyarakat sejahtera hutan terjaga, kalau masyarakat tidak sejahtera jangan mimpi hutan itu terjaga," kata TA Khalid di Banda Aceh, Rabu (12/10).

TA Khalid mengaku resah dengan kondisi hutan Aceh saat ini. Di mana saat kondisi sudah aman, pemerintah sudah bisa terlibat dan polisi bisa menjaganya, hutan Aceh malah semakin rusak bukan semakin terjaga. Dia mengatakan masyarakat sekitar hutan sepakat dengan yang namanya penyelamatan hutan khususnya Gunung Leuser, di sana terdapat empat satwa kunci yang saling hidup berdampingan. Akan tetapi untuk melakukan penjagaan itu pemerintah masih acuh tak acuh menganggarkan dana.

Oleh sebab itu dia mendesak agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar mengoptimalkan pelaksanaan program konservasi sumber daya alam hayati, di Banda Aceh. Dia menyarankan agar KLHK membuat focus group discussion (FGD) untuk membahas peta jalan pelestarian Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

> **BAHWA MASYARAKAT SEJAHTERA HUTAN TERJAGA, KALAU MASYARAKAT TIDAK SEJAHTERA JANGAN MIMPI HUTAN ITU TERJAGA,"**

Ke depan, lanjut TA Khalid, KLHK harus bekerja keras membuat roadmap bagaimana proses pengamanan serta pemanfaatan gunung Leuser lebih baik, sehingga dengan adanya pemetaan satu persatu persoalan bisa diselesaikan. "Alhamdulillah tadi kita sudah diskusi sehingga teman-teman KLHK sepakat untuk melakukan FGD berjalan untuk menyusun program menjaga dan mengamankan Leuser secara optimal," ujarnya. ● **ssb/aha**

FOTO: SSB/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid saat Kunjungan Kerja Komisi IV di Banda Aceh, Rabu (12/10).

Scan QR untuk berita selengkapnya

Atasi Banjir Rob **Harus Libatkan Berbagai *Stakeholder***

Tidak ingin menjadi persoalan klasik, Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin menegaskan penanganan banjir rob di Kota Semarang harus berkolaborasi dengan melibatkan berbagai stakeholder mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga lembaga terkait. Tanpa kolaborasi, baginya, banjir rob di Kota Semarang ini akan semakin menyusahkan hidup masyarakat, terutama di masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai.

"Beberapa kawasan, banjir rob yang ini sudah menjadi persoalan klasik di Semarang sampai Demak sampai wilayah Utara Pantura. Maka ini, saya minta kepada pemerintah, kepada Kementerian terkait untuk betul-betul serius untuk menangani persoalan ini biar masyarakat di sini tidak terus terendam oleh banjir," ucap Hamid kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (10/10).

Meninjau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSP) Kelas I Tanjung Emas, politisi Fraksi PKS itu tidak ingin stakeholder patah semangat untuk menangani masalah ini. Walaupun membutuhkan anggaran yang besar, namun dampak penanganan banjir rob yang tepat guna dan tepat sasaran akan sangat meringankan beban masyarakat.

"Memang resikonya tetap membutuhkan anggaran besar. Saya rasa ini menjadi prioritas karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak dan kita sendiri merasakan kalau kebanjiran itu nggak nyaman," pintanya.

Ia menjelaskan bahwa penyebab dari banjir rob di Kota Semarang adalah akibat penurunan permukaan tanah, sehingga permukaan air laut naik menjadi tidak terkendali. "Oleh karena itu, persoalan-persoalan ini harus segera diurai, harus dicermati secara detail, dirumuskan, direncanakan dan diberikan solusi yang tepat untuk penanganan banjir Rob ini," tandas Hamid. • **ts,rgt/aha**

Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin.

FOTO: SAM/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya

Peringati Hari Parlemen Indonesia, **Ibas Berikan Pelatihan Keuangan Kepada 'Emak-Emak'**

FOTO: IST/PDT

Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono saat mengikuti pelatihan 'Budgeting & Financial Planning' dalam rangka memperingati Hari Parlemen Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menggelar pelatihan *'Budgeting & Financial Planning'* dalam rangka memperingati Hari Parlemen Indonesia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Acara diikuti oleh 1.130 perempuan dari berbagai kalangan yang tergabung dalam Srikandi Demokrat.

Pelatihan yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta ini mengambil tema 'Cerdas Mengelola Keuangan Pribadi dan Keluarga'. Adapun tema tersebut diangkat sebagai bentuk awareness terhadap kondisi ekonomi saat ini. Mengingat, ancaman resesi dan dampak inflasi sudah mulai dirasakan masyarakat, salah satu dampaknya adalah kenaikan harga barang dan jasa.

"Hari Parlemen ini mengingatkan kita tentang peranan penting DPR RI sebagai pemersatu bangsa dalam bingkai NKRI. Sebab, melalui anggota dewan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka," ujar Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro Yudhoyono dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, Senin (17/10).

Ibas menyampaikan adanya ketidakpastian ekonomi yang mengancam juga perlu diantisipasi secara bijak, cermat, dan kolaboratif. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun SDM dan generasi muda yang kreatif, termasuk untuk mengelola keuangan dan menghasilkan kemandirian.

Lebih lanjut, tiga poin penting menurut Ibas dalam pengelolaan keuangan, yaitu memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, memahami dan menghitung seluruh pendapatan dan pengeluaran, serta memahami dan menyiapkan dana darurat serta jaga utang. Ibas juga mengingatkan pentingnya dana darurat sebagai sumber dana yang dapat digunakan dalam kondisi tidak terduga.

Terakhir, Ibas berharap, Pelatihan *Budgeting & Financial Planning* yang diadakan dapat mendorong naiknya partisipasi para perempuan hebat dalam parlemen. Mengutip peribahasa kuno dari negeri Tiongkok, Ibas mengatakan 'the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now'. "*So, start now and make it happen*!" pungkasnya. ● **ann/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Komisi VII Apresiasi **Kontribusi Positif Adaro Indonesia untuk Kabupaten Tabalong**

Sebagai salah satu kontributor terbesar bagi perekonomian nasional, industri batu bara seharusnya mampu memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah di sekitar wilayah pertambangan. Hal tersebut menjadi sorotan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI saat melakukan pertemuan dengan PT Adaro Indonesia yang merupakan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia dengan tambang yang berlokasi di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

"Kami datang hari ini untuk melihat program-program yang dilakukan PT Adaro terhadap pemerintah daerah mulai dari CSR (*Corporate Social Responsibility)* nya kemudian dari program kemasyarakatan yang telah mereka lakukan," ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR Dony Maryadi Oekon usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dengan PT Adaro Indonesia, di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (14/10).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan pihaknya mengapresiasi kontribusi yang diberikan PT Adaro Indonesia untuk daerah yang menjadi wilayah pertambangannya. "Jadi yang kami lihat paling utama adalah *multiplier effect* dari adanya tambang di daerah ini. Alhamdulillah sangat baik, banyak hasil yang daerah terima dengan adanya pt adaro di daerah ini," ungkapnya.

Dony berharap apa yang berhasil dilakukan PT Adaro Indonesia dan kontribusinya terhadap daerah, dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam industri pertambangan Indonesia, khususnya batubara. "Harapan saya, apa yang dilakukan Adaro sendiri baik itu bagi provinsi maupun daerah telah memberikan hasil, ini menjadi contoh dan semoga dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan tambang lainnya," pungkasnya.

> APA YANG DILAKUKAN ADARO SENDIRI BAIK ITU BAGI PROVINSI MAUPUN DAERAH TELAH MEMBERIKAN HASIL, INI MENJADI CONTOH DAN SEMOGA DAPAT DIIKUTI OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN TAMBANG LAINNYA

Sebelumnya, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani menyatakan kegiatan pascatambang dan berbagai program CSR PT Adaro Indonesia berkontribusi positif terhadap pembangunan dan masyarakat di daerahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten tersebut, yang kini berada pada urutan ketiga se-Kalimantan Selatan. ● **rr/aha**

FOTO: RR/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya

Wakil Ketua Komisi VII DPR Dony Maryadi Oekon saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dengan PT Adaro Indonesia.

DPR Berharap **Pemerintah Segera Serahkan DIM RUU EBET**

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti.

FOTO: OJI/PDT

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa pihaknya menyayangkan Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang tidak disertai dengan penyerahan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Padahal, pihaknya berharap RUU tersebut sudah resmi menjadi Undang-Undang (UU) sebelum perhelatan G20 pada November mendatang.

"Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) memang sudah diserahkan ke DPR, namun sayangnya tidak disertai dengan Daftar Inventaris Masalah (DIM) nya. Ini merupakan hambatan tersendiri bagi kami untuk melanjutkan pembahasan terkait RUU tersebut," ungkap Dyah Roro Esti kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Jumat (14/10).

Ia berharap RUU tersebut dapat disahkan sebelum perhelatan G20, sehingga bisa disampaikan pada forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) itu, dimana salah satu goal utamanya adalah transisi energi. Dan Indonesia, khususnya DPR memiliki keinginan kuat untuk mendorong melakukan transisi dari energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan.

Salah satunya lewat dukungan kebijakan berupa undang-undang

> **INDONESIA JUGA SUDAH MULAI MENJALANKAN EKONOMI HIJAU. EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TANPA HARUS MERUSAK LINGKUNGAN,**

energi baru dan energi terbarukan. Dijelaskan politisi Fraksi Golkar ini, energi fosil memang menimbulkan berbagai permasalahan atau dampak bagi lingkungan. Terutama emisi karbon yang dihasilkan dari bahan bakar fosil. Meski demikian, ia tidak memungkiri bahwa saat ini sekitar 80 persen industri bahan bakar di Indonesia masih mengandalkan pada energi fosil.

Namun dengan niat dan tekad yang kuat Ia optimis bahwa perlahan Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Sehingga bisa seutuhnya terlepas dari fosil, baik secara ekonomi maupun secara kebutuhan energi. Bahkan belakangan Indonesia juga sudah mulai menjalankan ekonomi hijau. Ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa harus merusak lingkungan, alias ekonomi yang ramah lingkungan.

"Nah, kalau untuk target penyelesaian RUU EBET ini, kembali saya sampaikan, bahwa kami di DPR masih menunggu DIM dari pemerintah, agar bisa dilakukan pembahasan. Jika target penyelesaian RUU ini tidak tercapai pada November mendatang, jangan salahkan kami, jangan salahkan DPR," pungkas Roro. ● **ayu/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Komisi VIII Apresiasi **Pelaksanaan Program Keagamaan, Sosial, dan Penanganan Bencana di Kepri**

FOTO: TIARA/PDT

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadizilly saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR ke Tanjung Pinang, Kepri, Selasa (11/10/2022).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily mengapresiasi pelaksanaan program keagamaan, sosial, bencana, serta pemberdayaan perempuan dan anak dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Berbagai program-program Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan lain-lain yang disalurkan dari pusat, untuk diketahui telah didistribusikan dengan baik dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya di Kepri.

"Alhamdulillah dari apa yang sudah disampaikan berbagai program tersebut telah tersalurkan dengan baik walaupun tentu tantangan di Kepri ini sangat berat sebagai daerah kepulauan, tentu distribusi bantuan sosial itu memerlukan penanganan cukup besar. Karena itu Kami juga meminta kepada kepala daerah untuk terus melakukan update kepada pemerintah pusat terkait dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS)," jelas Ace usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR ke Tanjung Pinang, Kepri, Selasa (11/10).

Adapun dalam Kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI turut menyerahkan bantuan dari Kemensos RI secara simbolis kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Bantuan tersebut berupa *Buffer Stock* penanganan bencana senilai total Rp665,2 juta. Tidak hanya itu, turut juga diberikan bantuan berupa Atensi Rehabilitasi Sosial untuk 20 orang lanjut usia, 50 orang korban penyalahgunaan Napza, dan 1 orang penyandang disabilitas sebesar Rp201 juta. Politisi Partai Golkar itu menambahkan penting untuk Komisi VIII DPR RI untuk memastikan bantuan-bantuan sosial tersebut tepat sasaran.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam paparannya mengatakan provinsi Kepri merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia dengan wilayah daratan hanya empat persen dan sisanya sebesar 96 persen berupa lautan. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi di Kepri sempat mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19 yang memukul sektor pariwisata dan industri. Namun berkat dukungan semua pihak, pertumbuhan ekonomi mulai menggeliat pada triwulan III 2022 sebesar 5,1 persen. • **tra/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Tinjau Ancaman Bencana Abrasi di Raja Ampat

Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses di Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai, Raja Ampat, Papua Barat. Tim yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka itu mendapatkan masukan terkait banyaknya pulau-pulau yang terancam hilang karena naiknya air laut. Termasuk juga persoalan air laut karena adanya abrasi.

Sehingga, berdampak tidak hanya menjadi ancaman banjir tapi juga kampung-kampung tradisional masyarakat yang hilang. "Jadi harus segera dipikirkan bagaimana strategi relokasinya," ujar Diah pasca penyaluran bantuan di lokasi, Selasa (11/10).

Selain meninjau pulau-pulau yang terancam hilang karena abrasi, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat tak mampu di kelurahan tersebut. Karena itu, ia mendapatkan masukan jika pemerintah menyalurkan bantuan ke daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) agar memperhatikan betul mengenai biaya operasional yang sangat tinggi karena kenaikan harga BBM.

"Serta bagaimana teknik penyalurannya karena perlu strategi khusus untuk pulau-pulau terluar yang tidak sama dengan daerah lain. Misalnya menyangkut waktu dan teknis penyaluran. Kita akan sampaikan masukan ini ke Mensos agar daerah-daerah yang daya jangkaunya jauh disesuaikan penyaluran bansosnya," ujar Politisi PDI-Perjuangan tersebut

Adapun bantuan langsung tunai yang disalurkan dari Kemensos RI diberikan kepada 30 orang penerima manfaat bantuan dengan total bantuan Rp39.000.000. Juga, penyaluran bantuan DAK Non-Fisik Dana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Kemen-PPPA Tahun 2023 untuk Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp375.000.000. ● **rdn/aha**

FOTO: RDN/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat menyerahkan bantuan dalam Kunjungan Kerja Reses di Kelurahan Sapor Danco, Distrik Kota Waisai, Raja Ampat, Papua Barat.

Komisi IX Dukung **Pembangunan Pelayanan Jantung di Bengkulu**

Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa menyampaikan bahwa Komisi IX DPR RI mendukung penuh rencana Pembangunan Pelayanan Jantung Terpadu (Kardiovaskular), di RSUD M. Yunus Bengkulu yang akan dilakukan secara bertahap. Dengan pembangunan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terjadi di Indonesia yaitu memangkas masa antrian pasien jantung yang akan melakukan pemasangan ring jantung dan sebagainya.

"Pasien jantung yang akan memasang ring jantung ini kan sering lama menunggu antriannya, dengan adanya misi Menteri Kesehatan ini yaitu mengembangkan Rumah Sakit Jantung yang tidak hanya di Jakarta saja namun di daerah lain tentu sangat baik," ungkap Saniatul Lativa saat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bengkulu, Senin (10/09).

Lebih lanjut, Saniatul menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memiliki kesiapan untuk membangun Pelayanan Jantung Terpadu (Kardiovaskular), di RSUD M Yunus ini. Pembangunan-pun ini akan dilakukan secara bertahap, dimana Alkes (Alat Kesehatan) nya sendiri akan disokong oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) untuk layanan ini sudah ada dan beberapa yang mulai dipersiapkan.

"Tadi disampaikan Gubernur Bengkulu, bahwa SDM nya sudah ada, dan beberapa sudah proses belajar (disekolahkan). Namun untuk operasi jantung yang terbuka masih belum, dan ini yang nanti akan didorong melalui Kementerian Kesehatan supaya SDM yang dibutuhkan dalam pengembangan rumah sakit jantung di Bengkulu bisa dipenuhi," ungkapnya.

Politisi Partai Golkar ini menekankan agar kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan bisa terus berjalan dengan baik, agar pengembangan RS M. Yunus Bengkulu ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Jika ini saling tangkap (melengkapi) pemerintah provinsi menyediakan ruanganya, Kementerian Kesehatan menyediakan Alkesnya dan SDM nya terpenuhi maka masyarakat akan merasakan manfaatnya dan pengembangan RS ini tidak sia-sia," tegas Saniatul. ● **skr/aha**

Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa.

FOTO: SINGGIH/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya

Pemerintah Didesak **Percepat Langkah Perlindungan Tenaga Kerja Informal**

FOTO: SHANE/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah saat bertemu dengan pekerja informal di Sentra Tenun Tunja dalam Kunker Reses Komisi IX DPR RI, di Palembang, Selasa, (11/10).

Walaupun mendapatkan apresiasi dari Komisi IX DPR RI atas dedikasinya dalam menyerap tenaga kerja ibu rumah tangga, Sentra Tenun Tunja masih memiliki permasalahan lain di bidang ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah saat menyoroti, masih belum adanya akses atau jaminan perlindungan terhadap para pekerja informal di Sentra Tenun Tunja ini.

"Yang harus disadari oleh pemerintah bahwa kelompok usaha yang kecil ini, sesungguhnya adalah penopang ketahanan ketenagakerjaan di Indonesia. Mereka tidak mengenal PHK, mereka tidak mengenal Serikat Pekerja, mereka itu sudah bekerja secara turun-temurun dan mereka menggunakan pola-pola yang tradisional yang harus didampingi adalah apapun kondisinya mereka sesungguhnya adalah pekerjaan dia harus mendapatkan haknya. Haknya misalnya soal proteksi kesehatan, BPJS Kesehatan, dan BPJS ketenagakerjaan," jelas Nur Nadlifah dalam Kunker Reses Komisi IX DPR RI, di Palembang, Selasa, (11/10).

> MEMANG PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA INFORMAL DI INDONESIA SAAT INI MASIH SANGAT LEMAH.

Nur Nadlifah juga menjelaskan bahwa memang perlindungan terhadap pekerja informal di Indonesia saat ini masih sangat lemah. Tidak hanya terjadi pada sektor kerajinan, tetapi sektor-sektor lain yang juga memberikan sumbangsih kepada negara, salah satunya adalah pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, Komisi IX berharap bahwa ada keseriusan dari Pemerintah untuk menjamin hak pekerja informal ini.

"Yang besok kita harus tekankan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini turunannya adalah dengan Dinas Tenaga Kerja, bahwa meskipun mereka bekerja di rumah masing-masing, tapi sesungguhnya mereka adalah bekerja. Apakah mendapatkan haknya misalnya minimal ada BPJS ketenagakerjaan yang meng-cover. Dan memberikan proteksi kepada para pekerja non formal itu juga masih mendapatkan kendala di banyak pihak, di lapangan harus kita support betul," jelas Politisi Fraksi PKB tersebut.

Untuk menyelesaikan masalah itu, Nadlifah menambahkan bahwa penting bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk berkolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat atau lembaga di daerah setempat, termasuk kelompok pengajar madrasah diniyah, dalam rangka memberikan proteksi kepada masyarakat yang lebih luas. ● **syn/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Tindakan Represif Aparat pada Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyayangkan penggunaan gas air mata pada pertandingan sepakbola di Stadion Kanjuruhan. Padahal sudah sejak lama FIFA melarang penggunaan gas air mata itu di arena pertandingan karena dampaknya bukan cuma menghalau tapi juga membuat sesak napas.

"Mengapa aparat menggunakan kekerasan yang begitu represif, bahkan menggunakan gas air mata," kata Dede Yusuf dalam keterangan yang diterima **Parlementaria**, Selasa (4/10). Ia pun menyesalkan tragedi yang terjadi pada pertandingan sepakbola di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur tersebut.

Apalagi diketahui, terjadi berbagai tindakan represif aparat dalam kejadian yang menewaskan lebih dari 125 orang tersebut. "Ini adalah sebuah bencana bagi dunia olahraga. Banyak orangtua kehilangan anaknya, anak-anak kehilangan orangtuanya, dan tidak sedikit korban jiwa datang dari generasi muda harapan bangsa," tuturnya.

Peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober lalu itu tercatat menjadi tragedi yang menelan korban jiwa terbesar kedua dalam sejarah kerusuhan di stadion sepakbola. Total ada 448 korban dalam Tragedi Kanjuruhan dengan rincian 302 orang mengalami luka ringan, 21 orang luka berat, dan 125 orang meninggal dunia. Kabar terbaru, jumlah korban kini pun bertambah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf.

FOTO: DEP/PDT

> **INI ADALAH SEBUAH BENCANA BAGI DUNIA OLAHRAGA. BANYAK ORANGTUA KEHILANGAN ANAKNYA, ANAK-ANAK KEHILANGAN ORANGTUANYA, DAN TIDAK SEDIKIT KORBAN JIWA DATANG DARI GENERASI MUDA HARAPAN BANGSA**

Diketahui, pihak kepolisian menembakkan gas air mata untuk menghalau suporter yang masuk ke lapangan usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 itu. Bahkan gas air mata juga ditembakkan ke bangku tribun sehingga membuat penonton berlarian berusaha keluar dari stadion.

Menurut Dede, harus ada pertanggungjawaban dari pihak terkait. Khususnya, kata Dede, pihak-pihak yang terlibat pada penyelenggaraan pertandingan tersebut. "Kita tidak boleh selesai hanya sampai dukacita. Harus ada yang tanggung jawab. Panitia pelaksana, PSSI, lantas aparat atas tindakan represifnya hingga sampai seperti itu," tegasnya. • **hal/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Ketua BKSAP Dukung **Pertemuan Tiga Pihak dalam Gugus Tugas Rusia-Ukraina IPU**

Gugus Tugas Konflik Rusia-Ukraina menggelar pertemuannya yang keenam di Kigali, Rwanda, Kamis, 13 Oktober 2022. Pertemuan tersebut dihadiri delapan anggotanya termasuk dari Indonesia Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Di pertemuan keenam Gugus yang bernama 'the IPU Task Force on the peaceful resolution of the war in Ukraine' itu dibahas empat agenda, yaitu laporan terakhir pertemuan kelima Gugus, update perkembangan konflik, audiensi Delegasi Rusia dan Ukraina, dan rencana agenda Gugus ke depan.

Fadli Zon, Anggota Task Force yang mewakili Grup Asia dan Pasifik di 'Inter-Parliamentary Union' (IPU) menginformasikan upaya DPR untuk mengajak Rusia dan Ukraina untuk duduk bersama dan berdialog pada Sidang P20. "Kami di P20 pada 6 dan 7 Oktober minggu lalu berhasil mengundang Delegasi Parlemen Rusia dan Ukraina. Keduanya duduk bersama-sama di satu forum. Kami mencoba merumuskan di P20 sebuah pernyataan bersama yang pada akhirnya tak dapat disepakati karena masih terdapat perbedaan cara pandang terkait perang di Ukraina," ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu dalam keterangan persnya kepada **Parlementaria**, Sabtu (15/10).

Lebih lanjut, Fadli menekankan ihwal kesiapan pihak Parlemen Rusia untuk berdialog dengan Parlemen Ukraina. "Pihak Rusia menyampaikan kepada kami kesiapannya untuk berdialog," sambungnya. Pada sisi lain, Fadli mengingatkan peran Gugus ke depan. "Apa selanjutnya yang akan dilakukan Gugus Tugas ini," tanya dia sembari mengingatkan bahwa jika perang berkepanjangan maka penderitan rakyat terus berlanjut.

FOTO: IST/PDT

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat mengikuti pertemuan keenam Gugus 'the IPU Task Force on the peaceful resolution of the war in Ukraine'.

Terkait apa yang disampaikan pihak Rusia dan Ukraina di pertemuan keenam Gugus itu, politisi Gerindra tersebut menyampaikan bahwa hasil pertemuan bersifat tertutup. Kendati demikian, secara prinsip ada beberapa hal yang dapat disampaikan ke publik. "Rusia meminta kita agar melihat konflik dari dua sisi dan bersedia berdialog dengan Ukraina. Sementara pihak Ukraina mengecam keras serangan Rusia yang terus berlangsung dan melihat tidak ada itikad baik Rusia untuk berdamai," terang dia.

Sementara terkait respon IPU task Force usai Rusia dan Ukraina menyampaikan pandangannya secara terpisah, kata Fadli, Gugus Tugas ini menekankan sejumlah hal penting antara lain komitmen untuk berupaya sebagai mediator yang dipercaya kedua pihak dan tetap melakukan aksi nyata meskipun kecil. "Trilateral meeting perlu segera diselenggarakan setidaknya untuk meredakan situasi," pungkas politisi Gerindra tersebut saat memberikan rekomendasi ke IPU Task Force. ● **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Putu Supadma Sampaikan **Komitmen Indonesia atasi Perubahan Iklim**

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk mengatasi perubahan iklim. Sebagai bukti komitmen tersebut, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 4,1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya untuk mengurangi emisi.

Berdasarkan keterangan pers yang diperoleh **Parlementaria**, hal tersebut disampaikan Putu pada 'Standing Committee on Sustainable Developments', sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-145 di Kigali, Rwanda, Rabu (12/10). Dalam sidang tersebut turut mendampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Thohir.

"Baru-baru ini kami menyerahkan Strategi Jangka Panjang untuk Low-Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) kepada sekretariat 'The United Nations Framework Convention on Climate Change' (UNFCCC) pada Juli 2022," ujar Politisi Fraksi Demokrat itu.

Kemudian pada bulan September tahun ini, sambung Putu, Indonesia telah menyampaikan 'Enhanced NDC' (Nationally Determined Contributions Document). Dokumen tersebut menyatakan peningkatan target penurunan emisi negara dari 29 persen menjadi 31,89 persen melalui sumber daya dan kemampuan negara sendiri serta dari 41 persen menjadi 43,20 persen, tentu saja hal tersebut harus mendapat dukungan dari dunia internasional.

Politisi dapil Bali ini menerangkan, Indonesia mulai menerapkan kebijakan energi hijau. Diantaranya percepatan penggunaan kendaraan listrik serta pengembangan bahan bakar B40 yang mengandung 40 persen bahan bakar berbahan kelapa sawit (biofuel) dan 60 persen solar.

"Sangat penting untuk menginformasikan bahwa Indonesia mampu mengurangi emisi dan deforestasi secara signifikan. Namun, masih membutuhkan dukungan dan kontribusi dunia internasional. Dan perlu digaris bawahi bahwa sektor kehutanan telah berkontribusi 60 persen dalam mencapai target net-zero emisi," imbuh Putu.

Terakhir, dalam forum sidang tersebut, Putu menyampaikan bahwa Indonesia mendorong regulasi kehutanan global yang tetap dan tidak mengikat guna menjaga fleksibilitas pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari. Yang sesuai dengan keseimbangan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi serta keunikan wilayah dan kondisi masing-masing negara. ● **tn/aha**

FOTO: IST/PDT

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana.

Scan QR untuk berita selengkapnya

Setjen DPR Dorong **Implementasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK**

FOTO: QQ/PDT

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI saat membuka rakor di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/10).

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar rapat kerja dalam rangka meningkatkan peran monitoring dan evaluasi dan mengimplementasikan Budaya kerja ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), untuk mendorong peningkatan kinerja dukungan Deputi Bidang Administrasi kepada DPR RI.

"Rapat ini difokuskan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh biro-biro di lingkungan Deputi Bidang Administrasi sekaligus mengevaluasi capaian kinerja," kata Deputi Bidang Bidang Administrasi Sumariyandono, seusai melakukan rakor di Vasa Hotel Ballroom, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/10).

Diharapkan hasil rapat kerja ini, kata Sumariyandono, dapat memberikan masukan konstruktif terhadap peningkatan kinerja dukungan Bidang Administrasi kepada DPR RI. Ia berharap rapat kerja ini menjadi awal yang baik dalam membangun komunikasi, dan koordinasi dalam melaksanakan dukungan kepada DPR RI. • **qq/aha**

Evaluasi Program PTSL Dalam Mengurangi Permasalahan Agraria

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pendaftaran tanah yang dirancang oleh kementerian ATR/BPN dalam rangka memenuhi amanat dalam RPJMN 2020-2024 dan dilakukan secara serentak bagi seluruh objek tanah yang berada di Indonesia dengan cara melakukan pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, penyajian, pemeliharaan data fisik pada objek tanah yang didaftarkan agar dapat mewujudkan pembangunan yang nyata, memastikan penerimaan sertifikat yang tepat sasaran serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN menerangkan bahwa jumlah sengketa tanah pada tahun 2021 di Indonesia mencapai 8.111 kasus. Dimana Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mampu menyelesaikan 1.591 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa rasio kemampuan negara untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah berada diangka 19,61% dari total kasus yang terjadi di tahun 2021, oleh sebab itu, program ini menjadi penting untuk menekan kasus sengketa tanah yang terjadi di tanah air.

Nyatanya, dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat hak atas tanah masih terdapat sertifikat yang telah terbit namun belum dilengkapi dokumen/berkas yang lengkap. Berdasarkan data yang sampling yang dilakukan pada 3 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa terdapat 120 sample dokumen yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang dan Kabupaten Lamongan yang sama sekali tidak dilengkapi oleh dokumen/berkas pendukung.

TOTAL 120 SAMPEL & BERKAS TIDAK LENGKAP

Sumber: LHP Kinerja PTSL pada Kementerian ATR/BPN TA 2020

Program yang diluncurkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat tersebut perlu didukung oleh dokumen/berkas yang lengkap sehingga tidak terjadi penyalahgunaan program PTSL yang salah satunya dilakukan oleh oknum mafia tanah dengan cara seperti memalsukan data-data pada sertifikat tanah, hal itu dapat mengakibatkan penerbitan sertifikat menjadi tumpang tindih dan berpotensi menjadi sengketa.

Dengan permasalahan yang terjadi, Kementerian ATR/BPN perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara komprehensif atas program PTSL, karena hal tersebut merupakan hak masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Perlunya monev atas program ini juga berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi utama Kementerian ATR/BPN dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan.

anytime, anywhere, support the parliament.

(Tim Puskaji AKN, diolah dari berbagai sumber)

Scan QR untuk berita selengkapnya

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menerima kunjungan dari Menteri Pendidikan Singapura Chan Chun Sing di Gedung Nusantara III. FOTO: MCN/PDT

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi dan Anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah saat menerima kunjungan sejumlah anggota APHR dari negara-negara di Asia Tenggara.
FOTO: JKA/PDT

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Santunan Yatim yang diselenggarakan KORPRI Setjen DPR RI di Masjid Baiturrahman DPR RI, Selasa (18/10/2022). FOTO: DEP/PDT